

Analisis Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jalan Berkeselamatan BPSDM Kementerian PUPR

Dudun Najmudin¹, Lia Susanti², Ilham Pebrian³

¹ Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

² Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

³ Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

Corresponding Author:

Dudun Najmudin, Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

Email: dudunnajmudin1989@gmail.com

Abstract

Road transportation safety is a major challenge in Indonesia, with the number of accidents increasing every year. The Human Resource Development Agency (BPSDM) of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has developed a safe road education and training curriculum as one of the efforts to improve the competence of the workforce in the road transportation sector. This article analyzes the macro and micro curriculum development of the training, including objectives, content, methods, and evaluation. This research uses a descriptive qualitative approach with document analysis. The results of the analysis show that there is a mismatch between the formulation of objectives and the national qualifications framework, a lack of relevance of the material to the needs of society and the latest technology, and deficiencies in assessment methods and instruments. This article recommends revising the curriculum to ensure its relevance and effectiveness in supporting safe driving in Indonesia.

Keywords: BPSDM Ministry of PUPR, curriculum evaluation, road safety, training curriculum, road transportation

Abstrak

Keselamatan transportasi jalan raya merupakan tantangan utama di Indonesia, dengan jumlah kecelakaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) jalan yang berkeselamatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi jalan. Artikel ini menganalisis pengembangan kurikulum secara makro dan mikro dari diklat tersebut, termasuk tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rumusan tujuan dengan kerangka kualifikasi nasional, kurangnya relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi terkini, serta kekurangan dalam metode dan instrumen penilaian. Artikel ini merekomendasikan untuk merevisi kurikulum untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung keselamatan berkendara di Indonesia.

Kata kunci: BPSDM Kementerian PUPR, evaluasi kurikulum, keselamatan jalan, kurikulum pelatihan, transportasi jalan.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan sektor transportasi jalan yang aman dan efisien menjadi salah satu prioritas utama untuk keberlangsungan dan pertumbuhan kota (Febriansyah & Gautama, 2021). Salah satunya tantangan keselamatan dalam penggunaan jalan terus menjadi perhatian, mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi dan beragam faktor risiko yang menyertainya (Sukmandari & Subekti, 2020; Siregar & Dewi, 2020). Menurut data dari Kementerian Perhubungan, tercatat korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa, dan pada tahun 2022 menelan korban tewas sebanyak 26.100. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pada umumnya mencatatkan angka kecelakaan yang semakin meningkat sepanjang 2023 yaitu meningkat sekitar 6,8% dibandingkan tahun lalu (Waluyo, 2024). Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang masih cukup tinggi, dengan kontribusi dari berbagai faktor seperti infrastruktur jalan yang kurang memadai, perilaku pengemudi yang kurang disiplin, serta kurangnya pemahaman akan keselamatan berkendara (Mubalus, 2023; Deskristian, 2021; Nugroho, 2020).

Dalam konteks ini, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara dan keterampilan mengemudi yang aman menjadi sangat penting (Putra, 2023; sahid et al., 2024). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki peran krusial dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi para pemangku kepentingan di sektor transportasi jalan, termasuk tenaga pengemudi, petugas jalan, dan para pelaku terkait lainnya. Pengembangan kurikulum pelatihan dan latihan jalan berkeselamatan oleh BPSDM Kementerian PUPR menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kualitas transportasi jalan di Indonesia (Yusuf, 2019; Hamid, 2024). Dengan menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan aktual di lapangan dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif, diharapkan para peserta pelatihan dapat menguasai keterampilan berkendara yang aman serta memahami pentingnya keselamatan dalam penggunaan jalan.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses pengembangan kurikulum pelatihan dan latihan jalan berkeselamatan oleh BPSDM Kementerian PUPR. Dengan memperhatikan dinamika dan kompleksitas sektor transportasi jalan di Indonesia, kami akan menelusuri komponen-komponen pengembangan kurikulum, dan menganalisis beberapa kebutuhan dalam penyelenggaraan pelatihan. Melalui pemahaman mendalam terhadap pengalaman BPSDM Kementerian PUPR dalam mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan jalan berkeselamatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan para praktisi di bidang keselamatan jalan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kesadaran akan keselamatan Berkendara dan keterampilan mengemudi yang aman di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus. Studi kasus merupakan strategi kualitatif yang mengeksplorasi secara mendalam sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih (Creswell, 2009). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari literatur data sekunder (*Secondary Source Literature*),

berupa dokumen atau literatur yang merangkum data primer (Creswell, 2008). Penggunaan metode ini bertujuan untuk membuat penjelasan yang sistematis, fleksibel, dan akurat mengenai sebuah program, kejadian, aktivitas, proses pada penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga BPSDM PUPR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUSDIKLAT berubah kembali menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Ruang lingkupnya pun berubah, dari “hanya” penyelenggara diklat menjadi Pengembangan Karier, Evaluasi Kompetensi, Pemantauan Kinerja, dan Pengembangan Kapasitas SDM melalui diklat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan ruang lingkup penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b.pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; d.pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Visi

“Meningkatkan Kualitas SDM dalam Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”

Misi

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, pemukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan perhubungan kelembagaan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tugas dan Fungsi

Kementerian PUPR membawahi beberapa organisasi, salah satunya adalah BPSDM. BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- b. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Analisis kurikulum yang dilakukan adalah analisis terhadap dokumen buku pedoman penyelenggaraan diklat BPSDM PUPR tahun 2016 dan dokumen yang ada di website <https://www.bpsdm.pu.go.id>. Dokumen ini merupakan panduan penyelenggaraan diklat secara tatap muka. Di tahun-tahun berikutnya, penyelenggaraan diklat di lingkungan BPSDM PUPR dilaksanakan secara daring (e-pelatihan). Informasi ini dapat dilihat di website, tampak pada tampilan beranda ada profil pelatihan dan kurikulum. Profil pelatihan muncul bagian-bagian, seperti jenis dan bidang pelatihan; jenis dan model pelatihan; syarat peserta, syarat pengajar; deskripsi dan tujuan pelatihan. Sedangkan pada laman kurikulum ada tampilan struktur kurikulum.

Analisis Level Kurikulum

Berdasarkan tingkatan pengembangan, kurikulum dibagi menjadi dua pendekatan yaitu Kurikulum makro dan kurikulum mikro (Dahliah, 2022; Anshori et al., 2022). Kedua level kurikulum memiliki komponen pengembangan yang sama, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi (Sumantri, et al., 2024). Kurikulum makro merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh tingkat lembaga di daerah atau skala nasional (Saragih et al., 2021). Kurikulum makro menunjukkan target suatu program diklat. Kurikulum makro meliputi analisis program diklat, menetapkan profil lulusan, menyusun standar kompetensi lulusan (SKL) atau CPL, menentukan bahan kajian, mata diklat, jam diklat, struktur kurikulum diklat, silabus diklat, dan evaluasi program.

Kurikulum mikro adalah kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga diklat untuk setiap pelaksanaan diklat yang diselenggarakan (Fadillah, 2024). Kurikulum mikro menunjukkan target suatu mata diklat. Kurikulum mikro meliputi melakukan analisis pembelajaran, merumuskan kompetensi capaian, menentukan materi diklat, menentukan komposisi teori dan praktek, memilih metode dan media, menentukan waktu, dan menyusun instrumen asesmen.

Tabel 1. Analisis Pengembangan Kurikulum Diklat

Komponen Kurikulum	Kurikulum Makro	Kurikulum Mikro
Tujuan	• Program diklat jalan berkeselamatan ada tujuan penyelenggaraan pelatihan • Tidak ada profil lulusan • SKL/CPL dalam bentuk deskripsi singkat • Menyusun silabus	• Tidak disebutkan adanya analisis pembelajaran • Terdapat capaian yang dijabarkan dalam SK dan KD
Isi	• Struktur kurikulum • Menetapkan mata diklat dan jam pelatihan • Menetapkan bahan kajian	• Adanya modul pelatihan, Materi sudah ditentukan BPSDM
Metode	• Proses pembinaan diserahkan	• metoda pelatihan orang dewasa

	tanggung jawabnya kepada Pusdiklat PUPR. Termasuk penentuan pengajar diklat	(andragogi) yang meliputi ceramah, tanya jawab, pemaparan dan diskusi, juga Kunjungan lapangan
Evaluasi	• Evaluasi Program • Evaluasi kinerja penyelenggara • Evaluasi pasca diklat • Evaluasi materi diklat • Evaluasi pengajar	• Terdapat kriteria penilaian • Terdapat pedoman penilaian (termasuk pembobotan) • Evaluasi kompetensi peserta pelatihan • Evaluasi akhir • Tidak ada penyusunan alat penilaian

Tabel 1 menunjukkan terdapat beberapa hal yang tidak relevan. Relevansi dilihat dari kesesuaian target masing-masing level kurikulum. Adapun pembahasan dijelaskan berdasarkan level kurikulum sebagai berikut.

Kurikulum Makro

Pada komponen tujuan, terdapat tiga aspek yang dianalisis yaitu Program diklat, tujuan diklat, Profil lulusan, SKL, dan silabus. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara program diklat dan perumusan tujuan diklat tidak relevan. Alasannya karena:

- 1) Rumusan tujuan terlalu sederhana, sehingga tidak menggambarkan pencapaian program secara menyeluruh.
- 2) Rumusan tujuan bersifat spesifik, yaitu terdiri atas satu tujuan dengan satu kompetensi khusus.
- 3) Rumusan tujuan menggunakan kata kerja kompetensi yang sulit terukur.
- 4) Rumusan tujuan diklat tidak sesuai dengan jabaran materi pelatihan yang sudah tersedia di modul pelatihan.

Pada dokumen, tidak ditemukan profil lulusan, sehingga profil lulusan diklat tidak dapat dianalisis. Begitu pula hanya dengan silabus diklat. Maka kedua aspek ini tidak dapat dianalisis. Sedangkan SKL ditemukan dalam bentuk deskripsi dan dijelaskan bahwa kompetensi yang diharapkan meliputi aspek pengetahuan dan sikap. Rumusan SKL ini tidak sesuai dengan capaian dalam Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahwa capaian pelatihan harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. SKL pun tidak relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Rumusan kompetensi harus diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, juga kebutuhan dunia kerja. Termasuk dalam materi harus sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknologi.

Analisis terhadap isi kurikulum dilakukan analisis terhadap struktur kurikulum diklat, mata diklat, jam pelatihan, dan bahan kajian. Dalam struktur kurikulum terdiri atas 14 mata diklat dengan jumlah jam 62 JPL (jam pelatihan) dan tempat pelaksanaan diklat di Balai Diklat BPSDM Kementerian PUPR. Sebagaimana aturan yang dijelaskan dalam KKNI, maka bentuk pelatihan ini berhak mendapatkan sertifikat (ada di bagian akhir dokumen panduan). Bahan kajian diklat harus disesuaikan dengan tujuan program. Bahan kajian ini berupa modul pelatihan yang terdiri atas 11 modul pelatihan. Pada komponen metode kurikulum, tidak ada metode khusus untuk mencapai tujuan program. Proses pembinaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tanggungjawabnya diberikan kepada Balai Pusdiklat BPSDM Kementerian PUPR. Pada komponen evaluasi program, diklat ini melaksanakan evaluasi kurikulum dengan komprehensi dilengkapi dengan kriteria penilaian dan pedoman penskoran

dan pembobotan. Evaluasi program yang dilaksanakan adalah evaluasi pengajar, evaluasi penyelenggara diklat, evaluasi pasca diklat, dan evaluasi materi diklat.

Kurikulum Mikro

Komponen tujuan kurikulum, aspek yang dianalisis adalah pelaksanaan analisis pembelajaran dan SK/KD. Di dalam dokumen panduan tidak dijelaskan adanya analisis pembelajaran/pelatihan, sehingga aspek ini tidak dapat dianalisis. Aspek SK dan KD dalam dokumen dijelaskan dengan sangat lengkap, beserta dengan modul pelatihan. Dari rumusan SK dan KD ada beberapa catatan yaitu:

- 1) Rumusan SK telah memenuhi unsur audience, behavior, condition. Satu lagi unsur rumusan SK yang belum tercantum, yaitu unsur degree.
- 2) Rumusan KD hanya memenuhi dua unsur, yaitu audience dan behavior.
- 3) Hal baik dari perumusan SK dan KD adalah SK telah dijabarkan ke dalam beberapa KD.
- 4) Rumusan SK dengan KD menggunakan kata kerja kompetensi yang sulit diukur, contohnya penggunaan kata “memahami” sehingga menyulitkan penilaian.
- 5) Rumusan kompetensi pada KD tidak menunjukkan pencapaian SK.
- 6) Jabaran materi pada KD ada yang tidak sesuai dengan rumusan materi pada SK, sehingga harus ada penambahan KD.

Pada komponen isi, aspek yang dianalisis adalah materi. Sebagaimana dijelaskan bahwa materi yang diberikan harus disesuaikan ruang lingkup dan sistematika urutannya (Aprilia, 2020). Hasil analisis terhadap judul-judul modul yang merupakan gambaran dari materi diklat menunjukkan kesesuaian dengan aspek ruang lingkup dan urutannya. Namun dilihat dari segi keilmuan, harus ada penyesuaian kembali materi-materi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini. Terakhir, komponen evaluasi dan penilaian, hasil analisis menunjukkan kesesuaian dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengenai standar nasional pendidikan tinggi, yaitu adanya kriteria penilaian dan pedoman pembobotan. Penilaian dilakukan terhadap capaian kemampuan pengetahuan dan sikap yang ditunjukkan peserta diklat. Komponen evaluasi pada kurikulum mikro adalah menyusun instrumen penilaian, namun hal ini tidak ditemukan di dokumen panduan kurikulum.

Analisis Penyelenggaraan Diklat

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil analisis penyelenggaraan diklat. Aspek yang dianalisis adalah profil penyelenggara diklat dan analisis kebutuhan diklat.

Tabel 2. Analisis Penyelenggaraan Diklat

Aspek Analisis		Hasil Analisis
Profil penyelenggara diklat	Nama program diklat	Jalan berkeselamatan
	Pembuat Kebijakan	Kementerian PUPR
	Pengembang kurikulum	Balai Diklat BPSDM Kementerian PUPR
	Pengajar	Ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu dilihat dari jenis pengajar, kualifikasi akademik, kompetensi, dan memenuhi syarat.
	Penilai Kebutuhan	Penyelenggara
Analisis Kebutuhan Diklat (<i>Training Needs Analysis</i>)	Need analysis	Terdapat pada aspek perencanaan, hasil analisisnya adalah kebutuhan pengajar, sarana dan prasarana, jumlah peserta, dan kebutuhan tenaga kediklatan.
	Performance Analysis	Ada penilaian terhadap kinerja penyelenggara dan pengajar.
	Feasibility Analysis	Program diklat ini layak untuk peningkatan ranah pengetahuan dan sikap

Aspek Analisis	Hasil Analisis
Task Analysis	Tidak ditemukan
Target population Analysis	Target 20-30 peserta per kelas yang telah memenuhi syarat dan kriteria.
Cost Analysis	Dibebankan pada anggaran unit Diklat BPSDM wilayah yang menyelenggarakan.
Need and want analysis	Program diklat ini merupakan kebutuhan yang urgen bagi peserta.
Contextual analysis	Analisis dilakukan untuk menentukan lokasi diklat yaitu di Balai diklat BPSDM Kementerian PUPR.

Tabel 2 menunjukkan bahwa profil penyelenggara diklat dan analisis kebutuhan diklat telah dirumuskan dengan baik, karena hampir semua aspek terpenuhi. Analisis kebutuhan pelatihan sangat penting dalam membangun pengembangan profesional berkelanjutan (Stanley, et al., 2022). Terdapat satu aspek yang tidak ditemukan pada dokumen yaitu analisis tugas. Tidak ada penjabaran tugas yang harus dilakukan oleh peserta. Hasil dari evaluasi program tidak ada data yang ditemukan, sehingga untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program diklat tidak dapat diketahui.

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan jalan yang berkeselamatan oleh BPSDM Kementerian PUPR merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Analisis terhadap kurikulum tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka kerja makro dan mikro yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Perumusan tujuan dan kompetensi belum sepenuhnya memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan aktual masyarakat serta perkembangan teknologi. Selain itu, materi pelatihan perlu diperbaharui agar relevan dengan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Evaluasi juga mengindikasikan bahwa metode pembelajaran perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, sementara instrumen penilaian belum sepenuhnya terstandarisasi untuk mengukur pencapaian peserta secara akurat. Analisis pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa meskipun analisis kebutuhan pelatihan telah dilakukan dengan baik, namun aspek analisis tugas dan efektivitas program perlu mendapat perhatian lebih untuk memastikan keberhasilan pelatihan.

Sebagai rekomendasi, kurikulum perlu diperbaharui dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi di era modern, kebutuhan masyarakat, dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi terkini. Evaluasi yang lebih komprehensif juga penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan di masa mendatang. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan.

REFERENSI

- Anshori, M. M., Umamah, N., & Srikantun, S. (2022). Organisasi Kurikulum (Fokus: Konsep, Prinsip, Elemen, Integrasi, dan Ruang Lingkup Pengorganisasian). *Journal Social Society*, 2(2), 85-104.
- Aprilia, W. (2020). Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum. *Islamika*, 2(2), 208-226.

- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2023). Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara. Kementerian Perhubungan RI. <https://dephub.go.id/>
- Waluyo, D. (2024). Angka Kematian Kecelakaan Transportasi Turun Sepanjang 2023. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial>
- Creswell, J.W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Third Edition. Pearson Merrill Prentice Hall.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Sage, Los Angeles.
- Dahliah, D. (2022). Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Educational Journal of Islamic Management*, 2(1), 31-44.
- Deskristian, G. (2021). Analisis Faktor Infrastruktur Jalan, Kelayakan Kendaraan Dan Human Error Terhadap Keselamatan Berkendara Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Ruas Jalan Walisongo Kota Semarang). *SKRIPSI*.
- Fadlillah, A. F. (2024). *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Literasi Media Bagi Guru Melalui Massive Open Online Course* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Febriansyah, F., & Gautama, G. (2021). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 508-518.
- Hamid, M. (2024). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur (Sdm) Dalam Menunjang Pelayanan Berbasis It Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara. *Journals of Social, Science, and Engineering*, 4(1), 138-144.
- Kemdikbudristek. (2012). Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Soscied*, 6(1), 182-197.
- Nugroho, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor (Studi di Wilayah Polres Sampang). <https://repository.unisma.ac.id>
- Putra, I. S. A. A. K. (2023). *Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- Sahid, S. Y., Soesanto, E., & Nurhidayat, A. (2024). Implementasi Aturan Safety Riding Berbasis Uud 1945 Tentang Aturan Lalu Lintas Di Sekolah Mitra Industri Mm2100. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 2(6), 142-156.
- Saragih, R., Marbun, R. C., Sitorus, M. H., Gultom, R. A. T., & Tobing, L. L. (2021). Pengembangan Kurikulum Prodi Pastoral Konseling Berbasis Kearifan Lokal. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 134-144.
- Siregar, Z., & Dewi, I. (2020). Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)*, 1(2), 63-73.

- Stanley, S., Shaw, E., & Bonwick, H. (2022). P-48 Learning together: a training needs analysis to promote inclusion of hospice staff in the development of an educational strategy.
- Sukmandari, E. A., & Subekti, A. T. (2020). Penerapan Keselamatan Berkendara Pada Remaja Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. *Jabi: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 1(2), 7-7.
- Sumantri, M. S., Edwita, E., Abustang, P. B., Wijaya, S., Triana, H., & Jayadi, J. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru di Pulau Tunda. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(2), 312-319.
- Yusuf, M. (2019). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi. *Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi*, 12(3), 27-36.